

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pendidikan merupakan salah satu kunci penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Namun, sampai dengan saat ini masih banyak orang miskin yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu, hal ini disebabkan antara lain karena mahalnya biaya pendidikan. Disisi lain, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar, yang dikenal dengan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Konsekuensi dari hal tersebut maka pemerintah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (Hemawan, 2011: 2).

Kenaikan harga BBM beberapa tahun belakangan dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan daya beli penduduk miskin. Hal tersebut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Seiring meningkatnya beban subsidi BBM yang harus dibayar pemerintah karena semakin meningkatnya harga minyak dunia, pada bulan Maret dan Oktober 2005 Pemerintah melakukan

pengurangan subsidi BBM secara drastis. Hal ini berdampak pada sektor pendidikan yang ditandai antara lain dengan banyaknya siswa putus sekolah karena tidak memiliki biaya untuk melanjutkan sekolah serta ketidakmampuan siswa membeli alat tulis dan buku pelajaran dalam rangka mengikuti kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Guna memperkecil dampak kenaikan harga BBM di sektor pendidikan, Masyarakat yang langsung merasakan dampak kenaikan harga BBM berupa melambungnya berbagai kebutuhan pokok, kesehatan, dan pendidikan adalah masyarakat ekonomi menengah ke bawah (Widiawati, 2010: 2).

Dalam rangka mengatasi dampak kenaikan harga BBM tersebut Pemerintah merealokasikan sebagian besar anggarannya ke empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan subsidi langsung tunai (SLT). Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Anonim, 2010: 1).

Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan

pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid, tanpa membedakan apakah siswa berasal dari keluarga yang mampu atau tidak.

Program BOS dicetuskan sebagai upaya untuk meningkatkan akses masyarakat khususnya siswa dari keluarga miskin terhadap pendidikan yang berkualitas dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. Sekolah yang menerima BOS diharuskan untuk mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh pengelola program, baik mengenai cara pengelolaan, penggunaan, pertanggung jawaban dana BOS yang telah diterima.

Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukoharjo, merupakan lembaga pendidikan yang mendapatkan BOS. Permasalahan Program BOS di secara umum di Madrasah Ibtidaiyah (MI), secara konsep diberikan untuk mengurangi beban masyarakat, khususnya masyarakat miskin atau tidak mampu agar mereka dapat memperoleh layanan pendidikan Wajib Belajar yang memadai dan bermutu, akan tetapi kenyataan praktek dilapangan pelaksanaan program BOS belum dapat berjalan seperti yang kita harapkan, hal dapat kita buktikan masih terdapat siswa tidak mampu yang belum memperoleh layanan pendidikan secara memadai seperti mereka tetap saja dalam memperoleh layanan pendidikan selalu dibebani biaya pendidikan lainnya seperti biaya pendaftaran, biaya sumbangan pembangunan, seragam sekolah dan lain sebagainya.

Permasalahan lain pelaksanaan program BOS adalah secara konseptual BOS diberikan kepada siswa/siswi tidak mampu atau masyarakat miskin, tetapi kenyataan dilapangan belum sepenuhnya siswa/siswi miskin/tidak mampu mendapatkan layanan pendidikan secara memadai. Sehingga hal ini sangat bertentangan dengan konsep program bantuan BOS sehingga perlu diluruskan. Permasalahan lain adalah penggunaan dana BOS oleh sekolah yang selama ini tidak pernah melakukan musyawarah dengan orang tua/wali termasuk dalam hal ini penyusunan RAPBS, sebaliknya orang tua murid /wali diundang oleh sekolah untuk berpartisipasi memberikan bantuan kekuarangan anggaran sekolah yang sudah di tetapkan oleh sekolah. Dalam praktek pihak Kepala Madrasah yang dominan untuk melakukan pengelolaan BOS, belum lagi masih rendahnya tingkat akuntabilitas, penggunaan dan pertanggungjawaban dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) oleh sekolah tidak di publikasikan atau belum pernah dilakukan audit oleh Akuntan publik, sehingga akuntabilitas dan kridibilitas masih diragukan (Suprpto, 2007: 3).

Permasalahan yang selalu dialami oleh masyarakat, meskipun dana BOS telah dikucurkan Pemerintah kepada Sekolah Dasar/sederajat maupun Sekolah Menengah Atas/setingkat tetap saja setiap tahun ajaran baru/penerimaan murid baru selalu memungut bantuan dana rutin berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan maupun iuran yang ditetapkan oleh kepala madrasah bersama dengan komite sekolah dengan berbagai dalih.

Terlepas dari permasalahan di atas, BOS terbukti berdampak positif terhadap pendidikan diantaranya adalah: (1) pihak sekolah sudah tidak memikirkan kekurangan biaya operasional sekolah lagi dan tentunya anak-anak Indonesia dapat mengakses sekolah. Selain itu juga bisa meningkatkan mutu pendidikan di daerahnya masing-masing. Depdiknas harus memaksa sekolah untuk meningkatkan kualitas dan layanan sekolah. (2) sejak diluncurkan program BOS terjadi peningkatan kualitas pendidikan cukup signifikan sehingga sekolah yang kualitasnya masih rendah makin lama makin sedikit. (3) Program BOS juga meningkatkan penerimaan sekolah. Daya akses seluruh lapisan masyarakat terhadap pendidikan juga semakin terbuka. Dengan dana BOS, sekolah dapat meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana belajar-mengajar, pendapatan guru (guru honor, guru kontrak, dan guru tetap), kegiatan ekstrakurikuler, pelajaran tambahan, dan mutu guru. Bahwa program BOS juga ditujukan untuk mencegah anak putus sekolah (Suhardi, 2010: 3).

Selain dampak positif, program BOS justru membuat masyarakat kurang berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Program sekolah gratis, maka harapan masyarakat sekolah tidak lagi melakukan pungutan dalam bentuk apa pun. Akibatnya, para orangtua mulai kendor mengawasi anak. Hal ini terlihat dari adanya siswa yang tidak datang mengikuti les menghadapi UN. Selain itu pendistribusian BOS dengan prosedur yang berbelit-belit, terkadang menghambat penerimaan BOS di Sekolah (Anonim, 2010: 1).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan mengkaji pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukoharjo, Tahun 2010-2011.

B. Fokus Penelitian

Berpijak dari latar belakang penelitian, maka fokus penelitian ini adalah: Bagaimana pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2011, fokus penelitian tersebut selanjutnya dirinci dalam sub fokus sebagai berikut:

1. Karakteristik pengajuan bantuan operasional sekolah (BOS) pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2011.
2. Realisasi dana BOS dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2011.
3. Karakteristik pertanggung jawaban dana BOS terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukoharjo.

C. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran nyata tentang pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2011. Secara khusus, tujuan ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan:

1. Karakteristik perencanaan dan pesedur pengajuan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2011.
2. Realisasi dana BOS dalam rangka meningkatkan akses pendidikan bagi siswa/siswi Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010-2011.
3. Pertanggung jawaban dana BOS terhadap Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kabupaten Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Kepala Madrasah
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas tentang pengelolaan BOS di Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sukoharjo
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kepala Madrasah dan pihak birokrat pendidikan dalam pengelolaan dana BOS.
2. Manfaat Bagi Dinas Pendidikan dan Departemen Agama

Sebagai bahan pertimbangan untuk pengembangan kebijakan pemerintah dalam rangka perbaikan dunia pendidikan melalui pemberian dana BOS.

3. Manfaat bagi Masyarakat

Untuk memberikan gambaran nyata tentang pengelolaan dana BOS di Madrasah Ibtidaiyah di Kabupaten Sukoharjo, dan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran masyarakat dalam pendidikan, khususnya terkait dengan biaya pendidikan.

4. Manfaat Bagi Warga Sekolah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan pemikiran bagi warga sekolah dalam rangka memperdalam wawasan dan pengetahuan tentang pengelolaan dana BOS.

E. Daftar Istilah

1. Pengelolaan dana BOS adalah perencanaan, pengajuan, pengalokasian dana, dan pertanggungjawaban dana BOS
2. Perencanaan dana BOS, adalah kegiatan menyusun rencana kebutuhan dana dan besarnya dana bantuan BOS
3. Pengajuan BOS, adalah pengajuan proposal kebutuhan dana BOS kepada pemerintah
4. Realisasi dana BOS adalah, besar cakupan dana BOS yang diberikan kepada setiap Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Kabupaten Sukoharjo
5. Pertanggung jawaban BOS, adalah kegiatan menyusun laporan dan menyampaikan pertanggung jawaban dana BOS